Bulletin of Economic Studies (BEST)
Volume 6, Nomor 3, (2026). pp.235-250
https://doi.org/10.24252/best.v6i3.73385

MENILAI PERANAN PENGELUARAN MAKANAN, PENDAPATAN PER KAPITA, DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM DINAMIKA KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

Assessing the Roles of Food Expenditure, Per Capita Income, and Human Development in Poverty Dynamics in East Java

Alya Rachma Silviana[1*], Debby Nindya Istiandari[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
*e-mail: alyarahma803@gmail.com

***Article History**: Received: October 08, 2026; Revised: October 23, 2026; Accepted: October 27, 2026*

ABSTRAK

Perbaikan kapasitas ekonomi dan pembangunan manusia di Jawa Timur belum sepenuhnya diikuti oleh kondisi kemiskinan yang merata antardaerah. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran makanan, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur selama 2021–2025. Analisis menggunakan data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) yang disusun dalam *balanced panel* sebanyak 190 observasi. Estimasi dilakukan dengan *Fixed Effect Model* (FEM) yang mengakomodasi efek tahun dan *cluster-robust standard errors*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa persentase pengeluaran makanan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kemiskinan. Pendapatan per kapita yang diproksikan dengan PDRB per kapita ADHK 2010 juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan, berlawanan dengan arah yang diharapkan dalam hipotesis. Sementara itu, IPM tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur berkaitan dengan struktur pengeluaran rumah tangga dan kapasitas ekonomi daerah, sedangkan hubungan IPM dengan kemiskinan belum terbukti signifikan secara statistik. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memadukan perlindungan daya beli, pemerataan manfaat perkembangan ekonomi, serta peningkatan kualitas manusia yang didukung oleh perluasan kesempatan ekonomi produktif.

Kata kunci: Kemiskinan; Pengeluaran Makanan; Pendapatan Per Kapita; IPM; Jawa Timur

ABSTRACT

Improvements in economic capacity and human development in East Java have not been accompanied by uniform poverty conditions across regions. This study examines the relationship between food expenditure, per capita income, and the Human Development Index (HDI) and poverty across 38 regencies and municipalities in East Java during 2021–2025. The analysis uses secondary data from Statistics Indonesia (BPS), organized into a balanced panel comprising 190 observations. Estimation is conducted using a Fixed Effect Model (FEM) with year effects and cluster-robust standard errors. The results show that the share of food expenditure has a positive and statistically significant relationship with poverty. Per capita income, proxied by GRDP per capita at constant 2010 prices, also exhibits a positive and statistically significant relationship with poverty, contrary to the hypothesized direction. Meanwhile, HDI does not show a statistically significant relationship with poverty. These findings indicate that poverty in East Java is associated

Copyright©2026

with household expenditure structure and regional economic capacity, whereas the relationship between HDI and poverty is not statistically significant. Therefore, poverty alleviation policies should integrate measures to protect purchasing power, ensure a more equitable distribution of the benefits of economic development, and improve human development alongside expanded access to productive economic opportunities.

Keywords**:** *Poverty; Food Expenditure; Per Capita Income; Human Development Index; East Java*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan mendasar dalam pembangunan ekonomi karena mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kesejahteraan. Di Jawa Timur, persentase penduduk miskin menurun dari 11,40% pada Maret 2021 menjadi 9,50% pada Maret 2025. Namun, penurunan agregat tersebut belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin mencapai 20,61% di Kabupaten Sampang, dibandingkan dengan hanya 2,86% di Kota Batu (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan kewilayahan yang perlu dipahami melalui berbagai dimensi sosial ekonomi. Periode 2021–2025 juga relevan karena mencakup pemulihan pascapandemi COVID-19, ketika perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan berpotensi berbeda antardaerah.

Salah satu dimensi yang berkaitan dengan kesejahteraan adalah struktur konsumsi rumah tangga, yang diukur melalui persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran. Berdasarkan Engel’s Law, proporsi pengeluaran makanan cenderung lebih tinggi pada kelompok berpendapatan rendah, sehingga indikator ini dapat mencerminkan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan. Farandy et al. (2026) menunjukkan bahwa pola konsumsi rumah tangga Indonesia konsisten dengan prinsip tersebut, sedangkan Anjarwati dan Ubaidillah (2025) menyoroti relevansi proporsi pengeluaran makanan dalam menggambarkan kondisi kelompok berpengeluaran rendah. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan diperkirakan berhubungan positif dengan kemiskinan.

Dimensi kedua adalah kapasitas ekonomi daerah, yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Peningkatan PDRB per kapita secara teoretis dapat memperluas kesempatan kerja dan pendapatan, sehingga berpotensi mengurangi kemiskinan. Falah dan Rahmawati (2024) serta Imantria (2024) menemukan hubungan negatif antara PDRB atau pendapatan per kapita dan kemiskinan. Namun, PDRB per kapita merupakan ukuran rata-rata yang tidak secara langsung mencerminkan distribusi manfaat pembangunan. Ketidakseimbangan distribusi tersebut dapat menjelaskan mengapa peningkatan kapasitas ekonomi tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan secara proporsional.

Dimensi ketiga adalah pembangunan manusia, yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mencakup aspek kesehatan, pendidikan,

serta standar hidup layak. Dalam perspektif kapabilitas, peningkatan kualitas manusia memperluas kemampuan individu untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan argumentasi tersebut, Falah dan Rahmawati (2024), Putri dan Fatimah (2024), serta Asqalani dan Fitanto (2024) menemukan hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan di Jawa Timur. Meskipun demikian, peningkatan kualitas manusia belum tentu segera mengurangi kemiskinan apabila tidak didukung kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi yang memadai.

Variasi ketiga dimensi tersebut terlihat pada kondisi kabupaten/kota di Jawa Timur. Persentase pengeluaran makanan berkisar dari 37,34% di Kota Malang pada 2023 hingga 65,38% di Kabupaten Sumenep pada 2022 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022b, 2023b). Sementara itu, PDRB per kapita ADHK 2010 berkisar dari sekitar Rp13,41 juta di Kabupaten Pamekasan pada 2021 hingga Rp320,12 juta di Kota Kediri pada 2025 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021b, 2025c). Perbedaan tersebut menggambarkan heterogenitas struktur konsumsi dan kapasitas ekonomi antardaerah, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan keduanya dengan kemiskinan. Oleh karena itu, keterkaitan indikator tersebut perlu diuji secara empiris dengan mempertimbangkan pembangunan manusia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan indikator sosial ekonomi dengan kemiskinan belum sepenuhnya konsisten. Falah dan Rahmawati (2024) serta Imantria (2024) menemukan hubungan negatif antara PDRB atau pendapatan per kapita dan kemiskinan, sedangkan Nairobi et al. (2025) menemukan hubungan negatif yang tidak signifikan. Sebaliknya, Harlan (2023) melaporkan hubungan positif pada konteks wilayah yang ditelitinya. Penelitian mengenai IPM umumnya menemukan hubungan negatif dengan kemiskinan di Jawa Timur (Asqalani dan Fitanto, 2024; Falah dan Rahmawati, 2024; Putri dan Fatimah, 2024). Adapun Anjarwati dan Ubaidillah (2025) serta Farandy et al. (2026) berfokus pada struktur konsumsi, sementara Yasin et al. (2026) menunjukkan hubungan negatif antara konsumsi nonmakanan dan kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Perbedaan fokus dan temuan tersebut memberikan dasar untuk menguji struktur konsumsi, kapasitas ekonomi, dan pembangunan manusia secara simultan dalam satu kerangka empiris.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan tiga dimensi tersebut dalam analisis kemiskinan pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2021–2025. Persentase pengeluaran makanan merepresentasikan struktur pemenuhan kebutuhan dasar, PDRB per kapita mencerminkan kapasitas ekonomi rata-rata wilayah, dan IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia. Penggunaan data panel memungkinkan analisis terhadap variasi antardaerah dan perubahan sepanjang waktu, sekaligus menguji hubungan setiap indikator dengan kemiskinan setelah memperhitungkan indikator lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan persentase pengeluaran makanan, PDRB per kapita ADHK 2010, dan IPM dengan persentase penduduk miskin, baik secara parsial maupun simultan. Temuan penelitian diharapkan memperkaya kajian kemiskinan regional dan memberikan masukan bagi perumusan kebijakan

yang mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan kapasitas ekonomi, dan peningkatan kualitas manusia. Karena menggunakan data observasional, hasil penelitian diinterpretasikan sebagai hubungan empiris, bukan sebagai bukti kausal secara langsung.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021 – 2025. Dengan demikian, struktur data terdiri atas 190 observasi, dengan asumsi seluruh variabel tersedia secara lengkap untuk setiap kabupaten/kota dan tahun pengamatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan indikator yang dianalisis. Periode 2021–2025 dipilih untuk mengamati keterkaitan antara struktur pengeluaran rumah tangga, kapasitas ekonomi daerah, pembangunan manusia, dan kemiskinan dalam dinamikan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID – 19.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin, sedangkan variabel independennya meliputi persentase pengeluaran makanan, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Persentase penduduk miskin diukur dalam satuan persen (%) berdasarkan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota. Persentase pengeluaran makanan diukur dalam persen (%) sebagai proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga. PDRB per kapita ADHK 2010 dinyatakan dalam rupiah per kapita untuk menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi riil per penduduk. Sementara itu, IPM diukur dalam poin indeks yang mencerminkan capaian pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Seluruh data variabel tersebut bersumber dari publikasi BPS Provinsi Jawa Timur dan/atau BPS kabupaten/kota selama periode pengamatan.

Dalam estimasi, variabel PDRB per kapita ditransformasikan ke dalam logaritma natural untuk mengurangi perbedaan skala nilai antardaerah dan menyesuaikan spesifikasi model. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam regresi adalah logaritma natural PDRB per kapita, sedangkan variabel lainnya dinyatakan dalam satuan aslinya. Penggunaan transformasi tersebut perlu diperhatikan ketika menginterpretasikan koefisien regresi karena perubahan pada variabel PDRB per kapita dinyatakan dalam bentuk logaritmik.

Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM). Model ini dipilih untuk mengendalikan karakteristik khusus setiap kabupaten/kota yang relatif konstan selama periode pengamatan dan berpotensi berkaitan dengan variabel penelitian. Efek tetap wilayah diterapkan melalui identitas kabupaten/kota, sedangkan efek tahun dimasukkan melalui variabel indikator tahun (*year fixed effects*) untuk mengendalikan perubahan

umum yang terjadi pada periode 2021–2025 dan dapat memengaruhi seluruh wilayah. Dengan demikian, spesifikasi model mencakup efek tetap wilayah dan efek tahun. Secara matematis, model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \propto + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 \ln(X2_{it}) + \beta_3 X3_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dalam persamaan (1), Y_{it} adalah presentase penduduk miskin kabupaten/kota i pada tahun t; $X1_{it}$ adalah presentase pengeluaran makanan, $\ln(X2_{it})$ adalah logaritma natural PDRB per kapita ADHK 2010; $X3_{it}$ adalah IPM; $\propto$ merupakan konstanta; β_1, β_2, dan β_3 merupakan koefisien regresi; serta e_{it} merupakan komponen galat. Koefisien β_1, β_2 dan β_3 digunakan untuk mengidentifikasi hubungan parsial setiap variabel independen dengan persentase penduduk miskin setelah mengendalikan variabel lain serta efek wilayah dan tahun.

Pengujian diagnostik dilakukan untuk mengevaluasi karakteristik residual dan mendukung pemilihan pendekatan inferensi statistik yang sesuai dalam regresi data panel. Pengujian meliputi pemeriksaan multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), heteroskedastisitas menggunakan *Modified Wald Test*, autokorelasi serial menggunakan *Wooldridge Test*, serta dependensi lintas unit menggunakan *Pesaran CD Test*.

Hasil pengujian diagnostik digunakan sebagai dasar dalam menentukan pendekatan estimasi dan perhitungan standar error. Karena ditemukan indikasi heteroskedastisitas dan autokorelasi serial, standar error dihitung menggunakan pendekatan *cluster-robust* pada tingkat kabupaten/kota. Pendekatan ini ditujukan untuk memperbaiki inferensi statistik dengan memperhitungkan kemungkinan korelasi dan ketidaksamaan varians galat dalam setiap unit panel, tetapi tidak diasumsikan dapat mengatasi seluruh potensi pelanggaran asumsi maupun kesalahan spesifikasi model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman dengan memperhatikan konsistensi spesifikasi efek kabupaten/kota dan efek tahun terhadap model akhir. Pengujian efek individual digunakan untuk menilai keberadaan efek tetap kabupaten/kota, sedangkan pemilihan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dilakukan dengan mengendalikan efek tahun sebagaimana spesifikasi model akhir. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Statistik	Prob	Keputusan
Uji efek individual kabupaten/kota	F(37,145) = 455,85	0,0000	Efek individual signifikan

Pengujian	Statistik	Prob	Keputusan
Uji Hausman	$\chi^2(7) = 57,92$	0,0000	Mengarah pada FEM, dengan catatan matriks kovarians
Uji Mundlak (CRE)	$\chi^2(3) – 36,13$	0,0000	Asumsi dasar REM ditolak

Sumber: Data sekunder diolah dengan Stata, Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, pengujian efek individual menunjukkan nilai F(37,145) sebesar 455,85 dengan probabilitas 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efek individual kabupaten/kota signifikan, sehingga model yang mengakomodasi perbedaan karakteristik antarwilayah lebih sesuai dibandingkan model *Common Effect*. Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai chi-square sebesar 57,92 dengan probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan adanya perbedaan koefisien yang signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dengan demikian, hasil pengujian mengarah pada penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM).

Pemilihan FEM juga didukung oleh pengujian *Mundlak* atau *Correlated Random Effects* (CRE), yang menghasilkan nilai chi-square sebesar 36,13 dengan probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi tidak adanya korelasi antara efek individual dan variabel independen pada model *Random Effect* ditolak. Oleh karena itu, FEM dipilih sebagai model estimasi utama dalam penelitian ini. Estimasi selanjutnya memasukkan efek tahun untuk mengendalikan perubahan kondisi yang terjadi secara umum antarperiode serta menggunakan *cluster-robust standard errors* pada tingkat kabupaten/kota untuk memperoleh inferensi statistik yang lebih andal.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Statistik	Prob	Kesimpulan
Normalitas	χ^2 (2) = 8,60	0,0136	Residual tidak berdistribusi normal
Multikolinearitas	Mean VIF = 3,55	Maksimum VIF = 4,71	Tidak terdapat indikasi multikolinearitas berat
Heteroskedastisitas	χ^2 (38) = 1303,47	0,0000	Terdapat heteroskedastisitas
Autokorelasi	F (1,37) = 15,127	0,0004	Terdapat autokorelasi
Pesaran CD Test untuk ketergantungan lintas unit	Z = -1,401	0,1611	Tidak terdapat bukti signifikan ketergantungan lintas unit pada taraf 5%

Sumber: Data sekunder diolah dengan Stata, Tahun 2026

Hasil pengujian diagnotis menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model. Oleh karena itu, estimasi FEM menggunakan *cluster-robust standard errors* pada tingkat kabupaten/kota untuk memperbaiki inferensi statistik dengan memperhitungkan heteroskedastisitas dan korelasi galat dalam kabupaten/kota dari waktu ke waktu. Penggunaan standard error tersebut tidak menghilangkan seluruh kemungkinan permasalahan model, tetapi membantu menghasilkan inferensi yang lebih andal dalam kondisi tersebut. Uji Pesaran CD tidak menunjukkan bukti ketergantungan lintas unit yang signifikan pada taraf 5% (p = 0,1611).

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Robust SE	t-statistik	Prob
Konstanta	-63,2155	24,0330	-2,63	0,012
Pengeluaran Makanan	0,0341	0,0160	2,13	0,040
Ln (PDRB per kapita)	5,8920	2,0987	2,81	0,008
IPM	0,1649	0,1126	1,46	0,152
Tahun 2022	-1,3685	0,1521	-9,00	0,000
Tahun 2023	-1,6861	0,2516	-6,70	0,000
Tahun 2024	-2,5618	0,3707	-6,91	0,000
Tahun 2025	-3,2472	0,4990	-6,51	0,000
Within R^2				0,8994
F-Statistik Keseluruhan Model			91,61	0,000
F-Test (Simultan X_1, X_2, X_3)			F (3,37) = 4,07	0,0136

Sumber: Data sekunder diolah dengan Stata, Tahun 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien pada Tabel 3 Berdasarkan hasil estimasi tersebut, persamaan empiris penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -63{,}2155 + 0{,}0341X_1 + 5{,}8920\ln(X_2) + 0{,}1649X_3 \quad (2)$$

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa persentase pengeluaran makanan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,040, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengeluaran makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Koefisien positif sebesar 0,0341 berarti bahwa peningkatan proporsi pengeluaran makanan sebesar 1 poin persentase berkaitan dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,0341 poin persentase, dengan asumsi variabel lain konstan (ceteris paribus).

PDRB per kapita dalam bentuk logaritma natural memiliki nilai probabilitas sebesar 0,008, lebih kecil dari 0,05. Artinya, PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap persentase penduduk miskin. Koefisien sebesar 5,8920 menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita sebesar 1%

berkaitan dengan peningkatan persentase penduduk miskin sekitar 0,0589 poin persentase, dengan asumsi variabel lain konstan (ceteris paribus).

Sementara itu, IPM memiliki koefisien positif sebesar 0,1649 dengan nilai probabilitas sebesar 0,152, lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun arah koefisien IPM positif, pengaruhnya terhadap persentase penduduk miskin tidak signifikan secara statistit, yang berarti, belum terdapat bukti empiris yang cukup untuk menyimpulkan adanya pengaruh IPM terhadap persentase penduduk miskin dalam model penelitian ini.

Secara simultan, hasil F-test menunjukkan nilai F (3,37) sebesar 4,07 dengan probabilitas 0,0136. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, ketiga variabel independen, yaitu persentase pengeluaran makanan, PDRB per kapita, dan IPM, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap persentase penduduk miskin.

Nilai *within* R^2 sebesar 0,8994 menunjukkan bahwa sekitar 89,94 persen variasi kemiskinan dalam kabupaten/kota dari waktu ke waktu dapat dijelaskan oleh kovariat dan efek tahun dalam model. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi temporal kemiskinan pada unit wilayah yang sama, tetapi tidak dapat diartikan sebagai bukti hubungan kausal.

Pengaruh Pengeluaran Makanan terhadap Kemiskinan

Hubungan positif antara persentase pengeluaran makanan dan kemiskinan dapat dipahami melalui *Engel's Law*, yang menjelaskan bahwa rumah tangga dengan kemampuan ekonomi terbatas cenderung mengalokasikan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, hubungan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa peningkatan pangsa pengeluaran makanan menyebabkan kenaikan kemiskinan. Kedua indikator memiliki keterkaitan konseptual karena sama-sama berkaitan dengan kondisi pengeluaran rumah tangga dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai indikator struktur konsumsi dan tekanan pemenuhan kebutuhan dasar, bukan sebagai penyebab langsung kemiskinan.

Arah hubungan tersebut dapat dipahami melalui *Engel's Law*. Besarnya porsi pengeluaran untuk makanan mencerminkan seberapa besar sumber daya rumah tangga harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Ketika makanan menyerap bagian yang relatif besar dari total pengeluaran, ruang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan nonpangan menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran tekanan konsumsi rumah tangga daripada sebagai faktor yang secara langsung menyebabkan kemiskinan.

Interpretasi tersebut sejalan dengan Olipra (2024), yang menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan per kapita dan proporsi pengeluaran makanan tetap relevan dalam menjelaskan perubahan struktur konsumsi. Menyhért (2024) juga menunjukkan bahwa pola pengeluaran dapat memberikan informasi mengenai kondisi kelompok berpendapatan rendah dan kerentanan

ekonomi rumah tangga. Temuan tersebut memperkuat penggunaan struktur pengeluaran sebagai salah satu indikator untuk membaca tekanan kesejahteraan.

Bukti empiris pada tingkat rumah tangga mendukung interpretasi tersebut. Muliandari dan Nasrudin (2025), menggunakan data SUSENAS Pulau Jawa, menemukan bahwa bantuan pangan BPNT/Sembako mampu menurunkan *food expenditure share* sekaligus meningkatkan keragaman konsumsi pangan. Fardian et al. (2024) menunjukkan keterkaitan antara bantuan sosial pangan, pola pengeluaran makanan, dan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Budiono et al. (2025) menemukan hubungan antara pendapatan keluarga dan pengeluaran pangan rumah tangga. Aryani et al. (2025) juga menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di wilayah pesisir Kabupaten Demak menghadapi kerentanan pangan yang tinggi berdasarkan indikator kecukupan energi dan pangsa pengeluaran pangan.

Dalam konteks Jawa Timur, Anjarwati dan Ubaidillah (2025) menunjukkan bahwa pada 2022 Jawa Timur memiliki persentase rumah tangga dengan *food expenditure share* lebih dari 65 persen tertinggi di Pulau Jawa. BPS Provinsi Jawa Timur juga mencatat bahwa pada Maret 2025 garis kemiskinan mencapai Rp558.029 per kapita per bulan, dengan garis kemiskinan makanan sebesar Rp425.719 atau 76,29 persen dari keseluruhan garis kemiskinan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025d). Dominannya komponen makanan dalam pembentukan garis kemiskinan menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan masih menjadi bagian penting dari kerentanan ekonomi masyarakat Jawa Timur. revisian publikasi Dengan demikian, semakin besar proporsi sumber daya yang harus dialokasikan untuk makanan, semakin terbatas ruang konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.

Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Kemiskinan

Hubungan positif antara PDRB per kapita dan kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi rata-rata wilayah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan selama periode pengamatan. PDRB per kapita merupakan indikator rata-rata yang tidak secara langsung menggambarkan distribusi pendapatan maupun sejauh mana manfaat perkembangan ekonomi diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, temuan ini perlu dipahami sebagai hubungan empiris dalam model penelitian, bukan sebagai bukti bahwa peningkatan PDRB per kapita menyebabkan kenaikan kemiskinan.

Secara teoritis, peningkatan pendapatan per kapita diharapkan meningkatkan kapasitas ekonomi, daya beli, dan kesempatan memperoleh pendapatan sehingga kemiskinan menurun. Falah dan Rahmawati (2024) menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Jawa Timur dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tias dan Sekaringsih (2025) juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan PDRB per kapita terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Pulau Jawa. Namun, Mannan dan Arifin (2025) menemukan hubungan positif dan signifikan, sedangkan Ali et al.

(2024) menemukan GRDP tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kapasitas ekonomi dan kemiskinan dapat berbeda menurut karakteristik wilayah, periode, distribusi manfaat perkembangan ekonomi, dan spesifikasi model.

Fenomena Jawa Timur memberikan konteks terhadap temuan tersebut. Perekonomian Jawa Timur pada 2025 tumbuh sebesar 5,33 persen dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp80,86 juta (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025c). Namun, pada Maret 2025 masih terdapat sekitar 3,876 juta penduduk miskin atau 9,50 persen penduduk Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025d). Pada periode yang sama, Gini Ratio tercatat sebesar 0,369 dan kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah menerima 18,83 persen dari total pengeluaran (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025a). Data tersebut tidak membuktikan bahwa distribusi pengeluaran menyebabkan koefisien PDRB per kapita menjadi positif, tetapi menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan kemiskinan perlu dianalisis secara bersamaan. revisian publikasi

Temuan tersebut juga relevan dengan kajian pertumbuhan inklusif. Purwanti (2024) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Jawa Timur perlu diarahkan menjadi lebih inklusif karena perbaikan pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran tidak selalu berlangsung secara seragam. Zulfia et al. (2024) juga menempatkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran sebagai dimensi penting dalam mengevaluasi pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Jawa Timur.

Koefisien positif PDRB per kapita dalam penelitian ini tidak dapat diartikan bahwa peningkatan PDRB per kapita menyebabkan peningkatan kemiskinan. PDRB per kapita merupakan ukuran rata-rata kapasitas ekonomi wilayah dan belum menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat. FEM mengidentifikasi hubungan berdasarkan perubahan dalam kabupaten/kota yang sama dari waktu ke waktu setelah karakteristik tetap wilayah, efek tahun, dan variabel lain dikendalikan. Dengan demikian, hasil penelitian lebih tepat menunjukkan bahwa selama 2021–2025 peningkatan kapasitas ekonomi daerah belum berkaitan dengan penurunan kemiskinan sebagaimana yang diperkirakan dalam hipotesis.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan antara perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perubahan kemiskinan setelah variabel lain, karakteristik tetap wilayah, dan efek tahun dikendalikan. Temuan ini belum mendukung hipotesis yang memperkirakan hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan. Meskipun peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara teoritis dapat memperkuat kemampuan produktif masyarakat, manfaat tersebut tidak selalu langsung tercermin dalam penurunan kemiskinan pada periode yang sama.

Falah dan Rahmawati (2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Jawa Timur dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Adha dan Rachmawati (2024) juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, sedangkan Asqalani dan Fitanto (2024) memperoleh hasil serupa untuk kabupaten/kota Jawa Timur periode 2017–2021. Kirana dan Nilasari (2025) juga menemukan hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan. Sebaliknya, Wawan et al. (2025), menggunakan FEM pada seluruh kabupaten/kota Jawa Timur periode 2017–2024, menemukan bahwa IPM tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pembangunan manusia dan kemiskinan dapat sensitif terhadap periode observasi, variasi data, variabel kontrol, dan spesifikasi model.

Pada tingkat provinsi, IPM Jawa Timur meningkat dari 73,48 pada 2021 menjadi 76,13 pada 2025. Pada 2025, umur harapan hidup mencapai 75,36 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 8,39 tahun, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025b). Meskipun demikian, pada Maret 2025 masih terdapat sekitar 3,876 juta penduduk miskin, dengan kemiskinan perdesaan sebesar 12,86 persen dan perkotaan sebesar 7,00 persen. revisian publikasi Kondisi tersebut tidak membuktikan bahwa IPM tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Salah satu kemungkinan interpretasi adalah adanya jeda waktu antara peningkatan pendidikan dan kesehatan dengan produktivitas, kesempatan kerja, dan pendapatan. Namun, karena periode 2021–2025 relatif pendek, kemungkinan *time lag* tersebut harus diperlakukan sebagai interpretasi dan bukan sebagai mekanisme yang telah dibuktikan oleh model.

Selain itu, FEM mengidentifikasi perubahan IPM dalam kabupaten/kota yang sama dari waktu ke waktu. Apabila perubahan IPM selama lima tahun berlangsung relatif bertahap, variasi *within-region* yang tersedia untuk menjelaskan perubahan kemiskinan menjadi lebih terbatas dibandingkan perbedaan IPM antardaerah. Oleh karena itu, tanda positif koefisien IPM tidak dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan IPM meningkatkan kemiskinan karena koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik.

Pengaruh Pengeluaran Makanan, Pendapatan per Kapita, dan IPM secara Simultan terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa pengeluaran makanan, pendapatan per kapita, dan IPM secara bersama-sama signifikan dalam menjelaskan variasi kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, signifikansi simultan tidak berarti bahwa setiap variabel memiliki hubungan yang signifikan secara parsial. Hasil tersebut menunjukkan relevansi ketiga variabel secara bersama-sama dalam model, tanpa membuktikan bahwa masing-masing variabel menyebabkan perubahan kemiskinan.

Pengeluaran makanan memberikan informasi mengenai tekanan pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatan per kapita menggambarkan kapasitas ekonomi wilayah, sedangkan IPM merepresentasikan kualitas manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Ketiga dimensi tersebut memberikan informasi yang saling melengkapi dalam memahami kondisi

kesejahteraan masyarakat (D'Attoma & Matteucci, 2024; Handastya & Betti, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persentase pengeluaran makanan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kemiskinan pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2021–2025. Pendapatan per kapita yang diproksikan dengan PDRB per kapita ADHK 2010 juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan, sehingga arah hubungan yang diperoleh berbeda dari hipotesis penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah selama periode penelitian belum berkaitan dengan penurunan kemiskinan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, IPM tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan. Secara simultan, persentase pengeluaran makanan, pendapatan per kapita, dan IPM menunjukkan signifikansi statistik dalam model kemiskinan. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dinamika kemiskinan antardaerah di Jawa Timur berkaitan dengan struktur konsumsi, kapasitas ekonomi wilayah, dan pembangunan manusia yang perlu dipahami secara terintegrasi.

Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur perlu mempertimbangkan kondisi konsumsi rumah tangga, perkembangan kapasitas ekonomi daerah, dan kualitas pembangunan manusia secara terpadu. Perlindungan daya beli perlu diarahkan terutama kepada kelompok masyarakat yang sebagian besar pengeluarannya masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Peningkatan kapasitas ekonomi daerah juga perlu disertai dengan perluasan kesempatan kerja produktif dan akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi agar manfaat perkembangan ekonomi dapat menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Meskipun IPM belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan dalam model, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap penting sebagai bagian dari pembangunan manusia serta perlu dihubungkan dengan keterampilan dan kesempatan ekonomi masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode observasi serta mempertimbangkan faktor lain, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, inflasi, dan perlindungan sosial, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika kemiskinan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

(1) Adha, A. A. N., & Rachmawati, L. (2024). The Effect Of Human Development Index And Open Unemployment Rate On The Number Of The Poor People In East Java Province. *Independent: Journal of Economics*, *3*(3), 131–140. https://doi.org/10.26740/independent.v3i3.58526

(2) Ali, M., Agustina, L. K., & Pahrudin, P. (2024). How Do Economic Development Indicators Affect the Poverty Level? Evidence from West Nusa Tenggara. *Jurnal Economia*, *20*(2), 183–196.

https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.67760

(3) Anjarwati, N. A., & Ubaidillah, A. (2025). *SMALL AREA ESTIMATION OF THE PERCENTAGE HOUSEHOLDS WITH FOOD EXPENDITURE SHARE MORE THAN 65 PERCENT IN LOW EXPENDITURE GROUP*. *19*(2), 927–936. https://doi.org/https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss2pp927-936

(4) Aryani, Y., Mukson, M., & Legowo, A. M. (2025). Analysis of Food Security and Livestock-Based Food Consumption Patterns among Poor Households in the Coastal Area of Demak Regency. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, *27*(3), 189–208. https://doi.org/10.25077/jpi.27.3.189-208.2025

(5) Asqalani, M. H., & Fitanto, B. (2024). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Pada Masa Pre-Post Pandemi Covid-19 Di Provinsi. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, *3*(4), 1098–1114. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.10

(6) Budiono, J. S., Sukandar, D., & Putri, M. (2025). Hubungan Pendapatan dengan Pengeluaran Pangan dan Tingkat Kecukupan Energi Protein pada Rumah Tangga Desa Babakan. *Jurnal Ilmu Gizi Dan Dietetik*, *4*(1), 52–58. https://doi.org/10.25182/jigd.2025.4.1.52-58

(7) D'Attoma, I., & Matteucci, M. (2024). Multidimensional poverty: an analysis of definitions, measurement tools, applications and their evolution over time through a systematic review of the literature up to 2019. *Quality & Quantity*, *58*(4), 3171–3213. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01792-8

(8) Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per capita, human development index, open unemployment rate, regional expenditure, and poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *25*(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327

(9) Farandy, A. R., Agustian, A., Rachman, B., Purba, H. J., Rachmawat, R. R., Inayah, I., … Muslimin. (2026). Changes in household food consumption patterns and demand elasticities in Indonesia : Implications for policy. *Social Sciences & Humanities Open*, *13*(May), 103036. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.103036

(10) Fardian, M. I., Nazer, M., & Muharja, F. (2024). The Impact of Rastra-BPNT Assistance on Household Food Expenditure Patterns and Poverty Status in Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, *6*(1), 28–37. https://doi.org/10.37034/infeb.v6i1.794

(11) Handastya, N., & Betti, G. (2023). The 'Double Fuzzy Set' Approach to Multidimensional Poverty Measurement: With a Focus on the Health Dimension. *Social Indicators Research*, *166*(1), 201–217. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03065-1

(12) Harlan, E. (2023). Bagaimana Konsumsi Tembakau, IPM, Ketimpangan,

Pendapatan dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan di Lampung? *Tirtayasa Ekonomika*, *18*(2), 22. https://doi.org/10.35448/jte.v18i2.22007

(13) Imantria, B. (2024). Determinants of Poverty in Indonesia: Does Per Capita Income Matter? *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *7*(3), 244–256. https://doi.org/10.15294/efficient.v7i3.13344

(14) Kirana, A. D., & Nilasari, A. (2025). The Effect of Economic Growth Rate, Human Development Index, and Open Unemployment Rate on Poverty in East Java Province 2019-2023. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, *4*(3), 1079–1094. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i3.97

(15) Mannan, W. A., & Arifin, A. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan, dan Pdrb terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 1587–1594. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1363

(16) Muliandari, N. A., & Nasrudin, R. (2025). Evidence on the Beneficial Impact of Food Voucher Programs in Java Island. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, *26*(1), 1–20. https://doi.org/10.23917/jep.v26i1.10693

(17) Nairobi, N., Ambya, A., & Yusuf Afif, F. (2025). Analyzing Poverty Across Indonesian Provinces Using Panel Data Regression. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(2), 77–85. https://doi.org/10.23960/jep.v14i2.4133

(18) Olipra, J. (2024). Does Engel's law work in central and Eastern European countries? The role of aspirations in determining food expenditures. *Structural Change and Economic Dynamics*, *71*, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2024.06.005

(19) Purwanti, D. (2024). Inclusive economic growth and fiscal intervention: could it reduce poverty, inequality, and unemployment in East Java? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *25*(1), 148–166. https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21694

(20) Putri, M. R., & Fatimah, A. (2024). *THE EFFECT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX , MINIMUM WAGE , AND Poverty is a complex social issue , not only limited to economic aspects , but also related to education , health , and overall quality of life . Poverty is often understood as the inability of in*. *6*(2), 127–144. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/convergencejep.v6i2.39021

(21) Tias, V. A., & Sekaringsih, R. B. (2025). Analysis of the Effect of GRDP per Capita, Open Unemployment Rate, and Provincial Capital Dummy on Poverty Levels in Regency/City in Java Island in 2023. *Bulletin of Islamic Economics*, *4*(2), 44–56. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/bie.2025.042-05

(22) Wawan, Y., Aristyanto, E., Rodhiyah, R., & Fitah Kusuma, P. (2025). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan

pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains)*, *4*(2), 178–197. https://doi.org/10.38156/worldview.v4i2.607

(23) Yasin, M., Santoso, D. B., Ananda, C. F., & Syafitri, W. (2026). Non-food consumption and regional poverty reduction : A pathway to inclusive regional welfare. *Local Development & Society*, *00*(00), 1–17. https://doi.org/10.1080/26883597.2026.2667810

(24) Zulfia, B., Dwiputri, I. N., & Isupova, E. (2024). An examination of inclusive economic growth and its factors: a case study of East Java, Indonesia. *R-Economy*, *10*(3), 350–368. https://doi.org/10.15826/recon.2024.10.3.022

Sumber Online:

(25) BPS Provinsi Jawa Timur. (2021a). Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Maret 2021 mencapai 11,40 persen. https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2021/07/15/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-maret-2021-mencapai-11-40-persen.html

(26) BPS Provinsi Jawa Timur. (2021b). Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (ribu rupiah), 2021. jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/T1hBNVYwVjBjMU5oTTA5SFVuWjRVSGhuYUhsV1p6MDkjMw%253D%253D/per-capita-gross-regional-domestic-product-at-2010-constant--market-prices-by-regency-municipality-in-jawa-timur-province--thousand-rupiahs---2021.html?year=202

(27) BPS Provinsi Jawa Timur. (2022a). Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 10,38 persen. https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-10-38-persen.html

(28) BPS Provinsi Jawa Timur. (2022b). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen), 2022. Retrieved October 23, 2026, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur website: https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur--persen-.html

(29) BPS Provinsi Jawa Timur. (2023a). Persentase Penduduk Miskin Maret 2023 turun menjadi 10,35 persen. https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-turun-menjadi-10-35-persen.html

(30) BPS Provinsi Jawa Timur. (2023b). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen), 2023. Retrieved October 23, 2026, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur website: https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur--persen-.html

(31) BPS Provinsi Jawa Timur. (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,79 persen. https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-79-persen.html

(32) BPS Provinsi Jawa Timur. (2025a). Gini Ratio Maret 2025 Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 0,369. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur website: https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/-gini-ratio-maret-2025-provinsi-jawa-timur-tercatat-sebesar--0-369.html

(33) BPS Provinsi Jawa Timur. (2025b). IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13 atau meningkat sebesar 1,035 persen dibandingkan tahun 2024. https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/ipm-jawa-timur-tahun-2025-mencapai-76-13-atau-meningkat-sebesar-1-035-persen-dibandingkan-tahun-2024.html

(34) BPS Provinsi Jawa Timur. (2025c). PDRB harga berlaku Jawa Timur tahun 2025 mencapai Rp3.403,17 triliun dengan PDRB per kapita Rp80,86 juta. https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/pdrb-harga-berlaku-jawa-timur-tahun-2025-mencapai-rp3-403-17-triliun-dengan-pdrb-per-kapita-rp80-86-juta.html

(35) BPS Provinsi Jawa Timur. (2025d). Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen dibandingkan September 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Retrieved October 2, 2026, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur website: https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1536/persentase-penduduk-miskin-jawa-timur-maret-2025-turun-menjadi-9-50-persen-dibandingkan-september-2024.html